

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perekonomian Indonesia saat ini Pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam mendorong perkembangan dari UMKM di Indonesia, dikarenakan UMKM memiliki prospek yang baik untuk lebih diberdayakan. Kepentingan tersebut terkait dengan kondisi perekonomian nasional yang sekarang dan beberapa tahun kurang meyakinkan. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya masalah yang harus dihadapi oleh UMKM itu sendiri diantaranya dapat diklasifikasikan dalam dua permasalahan utama yakni masalah finansial dan nonfinansial (organisasi manajemen). Dengan optimisme bahwa pertumbuhan peran UMKM, serta potensi-potensi yang sebetulnya dimiliki oleh bangsa Indonesia, maka perlu dirumuskan dan dijabarkan implementasi strategi dan program-program yang jelas untuk mencapainya. Untuk tujuan tersebut yang diperlukan adalah dukungan dari Pemerintah, dan dari stakeholder lainnya.

Disamping permasalahan yang terjadi pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada di Indonesia saat ini sangat pesat. Dengan adanya dukungan Pemerintah terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, masyarakat saat ini sadar bahwa menjadi pengusaha atau berwiraswasta dapat menjadi salah satu sumber pendapatan. Topik mengenai Usaha, Mikro Kecil dan Menengah



telah menjadi salah satu isu hangat dalam perekonomian Indonesia saat ini yang merupakan komitmen pemerintah dalam dalam pengembangannya.

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat menengah ke bawah yang berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sehingga dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur. Penyerapan tenaga kerja baru oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan berdampak secara signifikan dalam menurunkan tingkat pengangguran masyarakat Indonesia.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga memberikan kontribusi bagi Indonesia dari segi makro ekonomi. Pendapatan Domestik Bruto Indonesia yang dihasilkan dari kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat menjadi ujung tombak pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Hal itu terjadi karena Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bersentuhan langsung dengan masyarakat yang berada di sekitarnya dan menggerakkan perekonomian kerakyatan. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menggerakkan sektor riil, karena UMKM lebih berfokus pada pengembangan industri rumah tangga dan mendorong faktor produksi dan konsumsi. Sektor riil ini menghasilkan barang serta jasa yang dapat dinikmati baik secara langsung maupun tidak langsung.

Disaat Indonesia dihadapkan pada krisis moneter 1998 dan 2008



pengembangan secara berkelanjutan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dinilai dapat menjaga perekonomian Indonesia. Bertahannya UMKM disaat krisis disebabkan karena Usaha Mikro, Kecil dan Menengah relatif jarang menggunakan hutang perbankan, menggunakan mata uang rupiah, dan tidak atau belum berhubungan dengan pihak asing, sehingga secara signifikan dapat bertahan dan menjadi ujung tombak perekonomian pada saat itu.

Melihat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian Indonesia, UMKM merupakan salah satu sebagai penyumbang produk domestik bruto (PDB) Nasional yang memiliki peran penting bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung UMKM agar mampu bertahan, berkembang, dan bertumbuh di tengah tantangan pandemi dan transformasi melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah juga menyiapkan berbagai program lainnya untuk mendukung UMKM, seperti subsidi bunga, penempatan dana pemerintah pada bank umum mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, penjaminan kredit modal kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung (BT-PKLW), dan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah.

Menurut survei Badan Pusat Statistik tahun 2020, sekitar 69,02 persen UMKM mengalami kesulitan permodalan di saat pandemi Covid-19. Sementara, menurut Laporan Pengaduan ke KemenkopUKM per Oktober 2020, sebanyak 39,22 persen UMKM mengalami kendala sulitnya permodalan



selama pandemi Covid-19. Data tersebut menunjukkan bahwa bantuan permodalan bagi UMKM menjadi hal yang penting. Maka dari itu, pemerintah memberikan dukungan bagi UMKM dari sisi permodalan melalui program restrukturisasi kredit. Per 31 Juli 2021, tercatat terdapat lebih dari 3,59 juta UMKM telah memanfaatkan program ini dengan nilai sebesar Rp285,17 triliun.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42 persen dari total investasi di Indonesia. Berbagai upaya dan program yang telah diinisiasi oleh pemerintah perlu diperkuat dan didukung oleh berbagai pihak, termasuk sektor swasta agar dapat semakin memberikan manfaat yang optimal bagi UMKM.

Program-program yang diinisiasi Pemerintah dalam Pengembangan UMKM. menfokuskan sub sektor-sub sektor yang menjadi andalan dan sektor yang menjadi unggulan. Dimana potensi sektor andalan sebagai potensi dari sektor yang dimiliki secara dominan tanpa mempertimbangkan kemampuan daya saing sektor tersebut dalam perekonomian, sedangkan potensi subsektor unggulan adalah potensi subsektor andalan yang memiliki kemampuan daya saing (*competitive advantage*). Penggalan potensi ekonomi daerah sangat penting dalam rangka menggairahkan kegiatan perekonomian



daerah.

Di Kabupaten Kerinci penggalan potensi ekonomi daerah melalui UMKM menjadi kegiatan perekonomian daerah yang dapat mengurangi ketergantungan subsidi dari pusat. Secara teoritis peningkatan perekonomian masyarakat akan menyebabkan naiknya taraf hidup masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun data tentang jumlah Industri/ Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Rumah Tangga) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kerinci, 2018-2020 dapat dilihat pada table 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Jumlah Industri/ Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Rumah Tangga)
Menurut Kecamatan di Kabupaten Kerinci, 2018-2020

Kecamatan	Tahun		
	2018	2019	2021
Gunung Raya	1.602	1.602	1.632
Bukit Kerman	1.570	1.570	1.605
Batang Merangin	1.610	1.610	1.625
Keliling Danau	2.337	2.337	1.296
Danau Kerinci Barat	-	-	1.041
Danau Kerinci	1.933	1.933	1.258
Tanah Cogok	-	-	1.040
Sitinjau Laut	1.974	1.974	1.609
Air Hangat	2.097	2.097	2.097
Air Hangat Timur	1.306	1.366	1.366
Depati VII	1.239	1.239	1.239
Air Hangat Barat	1.704	1.704	1.704
Gunung Kerinci	2.114	2.164	2.164
Siulak	3.106	3.446	3.469
Siulak Mukai	1.120	1.140	1.155
Gunung Tujuh	2.105	2.135	2.165
Kayu Aro Barat	2.716	2.716	2.746
Jumlah	32.141	32.641	32.841



Sumber : Kabupaten Kerinci Dalam Angka 2021

Dari table diatas dapat diketahui bahwa Jumlah industri Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan 0,6 persen di tahun 2020. Jumlah ini meningkat menjadi 32.841 usaha di 2020 dari sebelumnya 32.641 usaha di 2019. Jumlah industri/usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terbanyak berada di Kecamatan Kayu Aro, yakni sebanyak 3.630 usaha. Sementara kecamatan baru, yaitu Kecamatan Tanah Cogok dan Danau Kerinci barat, memiliki UMKM paling sedikit yakni 1.040 dan 1.041 usaha. Secara rata-rata, setiap kecamatan di Kabupaten Kerinci memiliki 1.824 unit UMKM di wilayahnya. Sedangkan untuk melihat jumlah UMKM di Kecamatan Air Hangat barat yang merupakan objek penelitian ini sebanyak rata-rata 1704. Dari data diatas dapat digambarkan bahwa sektor UMKM di Kabupaten Kerinci memiliki peran dalam menyumbang kestabilan ekonomi, dengan perkembangan UMKM yang ada.

Secara teori, walaupun perkembangan UMKM meningkat, namun masih terdapat masalah dalam pengelolaan dana dan pencatatan akuntansi yang baik. Masalah seputar UMKM di Indonesia menurut penelitian yaitu mengenai permodalan yang kecil sehingga sulit memenuhi pesanan, sulit mendapatkan kredit dari bank, kurang mampu mengadakan pencatatan dan pelaporan yaitu tidak mampu membuat neraca dan laporan laba-rugi serta tercampurnya antara keuangan perusahaan dengan keluarga.



Pengelolaan dana dan pencatatan akuntansi dalam menjalankan kegiatan usaha, suatu perusahaan dihadapkan pada berbagai masalah yang beragam, hal ini terkait dengan adanya berbagai macam transaksi usaha yang terus berkembang sejalan dengan kegiatan perekonomian. Terlepas dari semakin beragamnya kegiatan usaha dan juga transaksi yang beraneka ragam tersebut maka secara otomatis kegiatan operasional juga semakin beragam pula, dengan demikian diperlukan adanya pengelolaan kegiatan usaha hingga kegiatan usaha dapat terkontrol dengan baik. Untuk itu diperlukan adanya suatu sistem akuntansi yang dapat digunakan untuk mengelola berbagai macam transaksi tersebut.

Sistem akuntansi terdiri dari berbagai macam prosedur-prosedur yang mengatur tentang berbagai langkah yang harus dilaksanakan agar suatu perusahaan dapat berjalan efisien dan efektif. Semakin kompleks suatu kegiatan operasional perusahaan maka sistem akuntansi semakin penting untuk diterapkan. Hasil dari sistem akuntansi tersebut adalah berupa informasi yang dapat digunakan untuk menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. Informasi yang disampaikan tersebut adalah dalam bentuk laporan keuangan. Informasi tersebut bermanfaat untuk penilaian kinerja suatu perusahaan, diantaranya untuk mengetahui berapa perolehan laba suatu perusahaan yang bermanfaat untuk kelanjutan hidup suatu perusahaan. Informasi keuangan yang merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi digunakan oleh berbagai pihak-pihak yang berkepentingan.



Karena beragamnya pemakai yang berkepentingan maka diperlukan adanya standar dalam penyusunannya, hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami laporan keuangan.

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh sejumlah besar pengguna dimana tidak dalam posisi meminta laporan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu yang mereka butuhkan SAK ETAP (2009:182). Akuntansi dalam penerapannya dilandasi oleh konsep-konsep dasar akuntansi yang melandasi bentuk, isi, dan pelaporan keuangan. Berikut adalah konsep-konsep dasar akuntansi : (1) Konsep entitas bisnis (*Business entity concept*) yaitu pemisahan transaksi usaha dengan transaksi non usaha (rumah tangga). (2) Dasar pencatatan akuntansi ada dua, yaitu dasar kas dan dasar akrual. (a) Dasar Kas (*Cash Basic*) transaksi dicatat atau diakui apabila kas sudah diterima atau dikeluarkan. (b) Dasar Akrual (*Accrual Basic*) transaksi dicatat atau diakui pada saat terjadinya transaksi tanpa melihat apakah kas telah diterima atau dikeluarkan. (3) Konsep kelangsungan usaha (*Going concern concept*) yaitu konsep yang menganggap bahwa suatu kesatuan usaha diharapkan akan terus beroperasi dan menguntungkan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. (4) Konsep periode waktu (*Time periodic*) yaitu suatu konsep yang menyatakan bahwa akuntansi menggunakan periode waktu sebagai dasar dalam mengukur dan menilai kemajuan suatu



perusahaan.

Laporan keuangan dihasilkan melalui proses akuntansi yang dikenal dengansiklus akuntansi yaitu tahap-tahap kegiatan dalam proses pencatatan dan pelaporan akuntansi, mulai dari pembuatan dan penerimaan bukti transaksi, pencatatan dalam buku jurnal, pemindah bukuan (posting) ke buku besar, pembuatan neraca saldo (*trial balance*), pembuatan neraca lajur dan jurnal penyesuaian (*adjustment*), menyusun laporan keuangan, pembuatan jurnal penutup (*closing entries*) pembuatan neraca saldo penutup (post *closing trialbalance*). Soemarso (2009:90). Penerapan sistem akuntansi perlu dilakukan oleh semua usaha baik usahakecil, menengah maupun besar, dan juga perlu diterapkan dalam semua jeniskegiatan usaha, baik perusahaan manufaktur, dagang maupun jasa, karena denganditerapkannya sistem akuntansi yang benar maka akan memperkecil terjadinyakesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, dan akan dapat menghasilkan informasi yang akurat.

Penerapan akuntansi pada UMKM sangat tergantung pada tingkat pengetahuan pengelola usaha terhadap ilmu akuntansi. Secara garis besar laporan keuangan UMKM tidak berbeda dengan laporan keuangan lainnya. Laporan keuangan UMKM merupakan laporan mengenai pertanggung jawaban kegiatan usaha kepada pihak luar yang mempunyai hubungan dengan kegiatan usaha. Berkaitan dengan peningkatan keahlian dan perkembangan usaha kecil menengah keterampilan dalam mengelola



pembukuan keuangan sangatlah penting bagi pelaku usaha. Langkah ini perlu dilakukan karena salah satu kelemahan utama yang dihadapi usaha kecil terletak pada permasalahan administrasi pencatatan.

Dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan tersebut, diperlukan pemahaman mengenai akuntansi. Jika diterapkan sebagaimana mestinya, akuntansi dapat memberikan gambaran laporan keuangan dan pengendalian seluruh aktivitas usaha dan pada akhirnya pengawasan dapat dilakukan dengan bantuan laporan akuntansi tersebut. Ada salah satu karakteristik usaha kecil yang menonjol yaitu pengelolaan usaha yang didominasi oleh pemilik usaha. Hal ini berakibat pada pengelolaan keuangan usaha dimana tidak ada pemisahan antara keuangan usaha dengan keuangan rumah tangga. Padahal dalam konsep dasar akuntansi yaitu konsep-konsep yang melandasi bentuk, isi dan susunan laporan keuangan, menjelaskan bahwa harus adanya pemisahan antara keuangan usaha dengan keuangan rumah tangga yang dikenal dengan konsep kesatuan ekonomi Samryn, (2015:23).

Akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan kecil tergantung pada pengetahuan yang didapat mengenai ilmu akuntansi. Biasanya akuntansi masih dilakukan secara sederhana atau tradisional baik dari segi pengelola organisasi maupun keuangannya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh sektor berskala kecil atau pengusaha kecil adalah kemampuan dalam melaksanakan penerapan akuntansi yang



baik dan berguna untuk mengetahui prestasi pengusaha dalam mengelola usaha ditinjau dari segi keuangan.

Penerapan akuntansi tak terlepas dari sistem yang digunakan. Sistem yang digunakan merupakan suatu kesatuan yang berisi komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain untuk memudahkan aliran informasi, materi dan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan peraturan akuntansi adalah pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sayangnya, masih banyak pengusaha UMKM yang masih merasa asing dengan sistem dan peraturan yang ada sekarang ini. Hal itu terbukti karena masih banyak pengusaha UMKM yang tidak mengetahui bahwa ada suatu peraturan yang dapat menjadi pedoman dalam pembuatan sistem pencatatan akuntansi.

Dalam pembentukan sistem pencatatan adalah memahami terlebih dahulu persamaan akuntansi, yaitu persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari hutang dan modal perusahaan. Langkah kedua adalah memahami siklus akuntansi. Siklus akuntansi menurut Soemarso (2009 : 94) adalah tahapan-tahapan kegiatan mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan sehingga siap untuk pencatatan transaksi periode



berikutnya yang terjadi secara berulang-ulang dan terus menerus.

Penelitian ini mengambil obyek pada UMKM di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci maka untuk terus dapat mengembangkan UMKM di Kecamatan Air Hangat Barat juga membutuhkan suatu sistem yang memadai. Salah satunya adalah sistem yang berkaitan dengan kegiatan akuntansi yaitu pencatatan yang memadai agar dapat memberikan informasi yang handal terkait kondisi ekonomi usaha sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Selain itu dengan sistem pencatatan yang memadai dan handal maka para pelaku usaha akan dapat menyusun laporan keuangan yang mencerminkan kondisi keuangan pada periode tersebut, sehingga akan lebih mudah untuk mengambil langkah strategis dalam pengembangan usahanya.

Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan SAK EMKM salah satunya dari Tegar Satriyo Notohatmodjo tahun 2014 dalam penelitian Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Enitas Mikro Kecil dan Menengah pada UMKM di Kota Semarang dalam penelitian ini menunjukkan bahwa catatan atas laporan keuangan yang menyajikan gambaran umum perusahaan, pernyataan bahwa penyusunan laporan Keuangan menggunakan SAK EMKM sebagai dasar penyusunan yang digunakan, serta kebijakan akuntansi yang diterapkan dan disajikan dalam laporan keuangan UMKM di Kota Semarang.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fitrianti Maimuna tahun 2018 pada UMKM di Kabupaten Lembata Provinsi NTT menunjukkan bahwa



Pencatatan Akuntansi pada usaha kain tenun ikat di Kabupaten Lembata belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK - EMKM) dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan tentang pencatatan Akuntansi dan kurangnya sosialisasi tentang SAK EMKM.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya memfokuskan pada Pencatatan Akuntansi Berbasis SAK EMKM. Pada penelitian ini juga memfokuskan pada Pencatatan Akuntansi Berbasis SAK EMKM, namun lebih mengkaji ulang tentang Apakah memang pernyataan ini hanya ada di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci atau juga ada di beberapa daerah atau Provinsi lainnya. Juga pada penelitian ini mencoba menerapkan ulang Pencatatan Akuntansi Berbasis SAK EMKM di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci. Apakah memang pokok persoalannya sama tentang masalah Sumber Daya Manusia atau masalah sosialisasi. Fokus penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana para pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat membuat suatu sistem pencatatan Akuntansi berdasarkan pada SAK EMKM dan disesuaikan dengan kebutuhan usaha perusahaan sehingga pengusaha-pengusaha tersebut dapat lebih mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya dari perusahaan mereka.

Dengan pertimbangan latar belakang diatas maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian ini ***"Evaluasi terhadap sistem pencatatan akuntansi pada usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Air Hangat***



Barat”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah para UMKM membuat dan menerapkan sistem pencatatan akuntansi di Kecamatan Air Hangat Barat?
2. Apakah para pelaku UMKM tersebut telah menerapkan suatu sistem pencatatan akuntansi yang memadai yang mampu mencerminkan kondisi ekonomi UMKM di Kecamatan Air Hangat Barat?
3. Apakah sistem dan peraturan yang ada telah dapat dimengerti dan diterapkan oleh para pengusaha UMKM di di Kecamatan Air Hangat Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini maka tujuan penelitian ini yaitu :

- 1 Untuk mengetahui bagaimanakah para UMKM membuat dan menerapkan sistem pencatatan akuntansi di Kecamatan Air Hangat Barat?
- 2 Untuk mengetahui apakah para pelaku UMKM tersebut telah menerapkan suatu sistem pencatatan akuntansi yang memadai yang mampu mencerminkan kondisi ekonomi UMKM di Kecamatan Air Hangat Barat?
- 3 Untuk mengetahui apakah sistem dan peraturan yang ada telah dapat dimengerti dan diterapkan oleh para pengusaha UMKM di di Kecamatan Air Hangat Barat?



1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberi manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat yang diberikan yaitu secara akademis dan praktis :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan dibidang pencatatan akuntansi khususnya penerapan pada UMKM dan berguna sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan Evaluasi terhadap sistem pencatatan akuntansi pada usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Air Hangat Barat

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Air Hangat Barat jika diterapkan sebagaimana mestinya, akuntansi dapat memberikan gambaran laporan keuangan dan pengendalian seluruh aktivitas usaha dan pada akhirnya pengawasan dapat dilakukan dengan bantuan laporan akuntansi tersebut.



